



RAMADHAN, TPID DENPASAR ANTISIPASI LONJAKAN HARGA **HAL.05**

Hal. 2



**GUBERNUR BALI INKINKAN
KERETA API BERNUANSA
LOKAL**

Hal. 8



**BADUNG OPTIMISTIS ANGKA
KEMISKINAN TURUN NOL
PERSEN**

Tujuh Gubernur Jawa-Bali Komitmen Eliminasi Malaria

Sebanyak tujuh gubernur dan Wagub dari Pulau Jawa dan Bali menandatangani komitmen untuk mencapai eliminasi malaria paling lambat pada 2022 dalam peringatan Hari Malaria Sedunia ke-12 di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Senin.

“Kita sudah ditegur WHO harus 2030 sudah eliminasi malaria semuanya. Kalau tidak ada komitmen, tidak akan mungkin,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Malaria Sedunia itu.

Tujuh pemerintah provinsi yang menandatangani komitmen eliminasi malaria adalah Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPA Paku Alam X dan perwakilan Pemerintah Provinsi Banten.

Sebelum komitmen eliminasi

malaria ditandatangani, komitmen tersebut dibacakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster yang berisikan empat poin, yakni pertama, mencapai eliminasi malaria tingkat provinsi paling lambat pada tahun 2022, selanjutnya poin kedua berkomitmen untuk membuat regulasi daerah untuk pencapaian eliminasi dan pemeliharaan daerah bebas malaria.

Kemudian poin ketiga, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mempertahankan daerah bebas malaria dalam mencegah penularan kembali malaria dan kesiapsiagaan KLB (APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan sumber lain).

Selanjutnya poin terakhir berisikan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pemeliharaan bebas malaria meliputi penguatan surveilans malaria, penguatan diagnosa dini malaria, dan mengobati dengan tepat, serta penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru malaria serta



Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan komitmen eliminasi malaria dengan didampingi sejumlah gubernur dan wagub dari provinsi lainnya (AntaraneWS Bali/Ni Luh Rhisma)

penguatan jejaring kemitraan dalam pencegahan malaria.

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan menyadari bahwa memang bukan perkara mudah untuk memberantas malaria 100 persen di Tanah Air, di tengah kondisi jumlah penduduk yang sangat besar dan kondisi geografis juga tidak begitu mudah dijangkau.

Nila Moeloek menambahkan, dari 34 provinsi di Indonesia,

ada lima provinsi yang belum satupun kabupaten/kotanya mencapai status eliminasi malaria, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah mendorong kebijakan pengurangan sampah plastik, sebagai salah satu upaya untuk mencegah malaria. (ant)

Gubernur Bali Ingin Kereta Api Bernuansa Lokal



Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pemaparan dan Diskusi Pembangunan Kereta Api Provinsi Bali (AntaraneWS Bali/Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan rencana pengoperasian unit dan jalur kereta api di Pulau Dewata nantinya bisa bernuansa lokal atau tetap harmonis dengan alam dan budaya Bali serta ramah lingkungan.

“Kami ingin desain yang beda, dengan estetika dan ciri

khas tersendiri, dengan sentuhan (nuansa) lokal. Jadi berbeda dengan daerah lain. Bali ini kecil, tapi selalu dilihat dunia,” kata Koster dalam Pemaparan dan Diskusi Pembangunan Kereta Api Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat malam.

Rencana pembangunan kereta api tersebut, menurut

Koster, sebagai perwujudan jaringan transportasi yang memadai di Pulau Dewata dan masyarakat pun telah merespons baik rencana itu.

“Bali ‘kan jadi tujuan wisata dunia, jadi sorotan internasional. Sudah sepantasnya punya jaringan transportasi yang memadai,” ujarnya.

Ke depan, Koster juga menyatakan akan terus mendorong penyempurnaan sistem transportasi di Bali. “Transportasi darat, laut dan udara akan terus disempurnakan selain untuk masyarakat, juga mendukung industri pariwisata di Bali,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah pusat menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 20 juta orang per tahun. Bali sendiri tetap menjadi destinasi wisata unggulan untuk menggaet kunjung-

gan wisatawan asing ke Tanah Air. “Dan ini mesti didukung oleh sarana transportasi yang baik,” kata pria asal Sembiran, Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Gede Pasek Suardika menyatakan dukungannya, bahkan mendorong realisasi pembangunan dan pengembangan kereta api di Bali.

“Ini juga sesuai amanah Bapak Presiden yang mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional,” ucapnya.

Ia juga menyarankan agar jalur kereta api nantinya bisa terhubung pula dengan bandara dan pusat-pusat kegiatan lain, sehingga mempercepat akses dan layanan pada masyarakat. (ant)

Sekda Bali: Pensiunan PNS Tetap Bisa Mengabdikan Untuk Masyarakat



Sekda Bali Dewa Indra pada acara Pelantikan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) masa bakti 2017-2022, di Denpasar (ANTARA/Ni Luh Rhisma)

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta pensiunan PNS di daerah itu agar tetap bisa berperan aktif mengabdikan untuk masyarakat dan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman ketika masih aktif bertugas.

“Saya mendorong apapun yang bisa dilakukan kepada kita

generasi muda dan warga masyarakat sekitarnya. Yang paling penting dengan adanya organisasi ini mereka bisa tetap saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan satu sama lain,” katanya pada pelantikan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) masa bakti 2017-2022, di Denpasar, Jumat.

PWRI, lanjut dia, menjadi

salah satu wadah untuk mengaktualisasikan potensi, bakat dan semangat baru setelah menjalani masa purna tugas bagi para abdi negara.

“Saya berharap agar program-program kerja pengurus yang terdahulu, yang sudah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan anggota agar dilanjutkan. Ke depan agar dibuat juga program kerja yang inovatif sehingga nantinya keberadaan PWRI sebagai organisasi para pensiunan PNS akan semakin dapat dirasakan manfaatnya, baik itu bagi anggota maupun bagi masyarakat,” ucap Dewa Indra.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia Haryono Suryono dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Penasehat PWRI Provinsi Bali Ni Made Riasih mengatakan salah satu program PWRI bertujuan tercapainya kesejahteraan ang-

gota segenap pensiunan PNS.

Upaya yang dilakukan diantaranya dengan peningkatan kesehatan, kemampuan hidup mandiri dan tetap bisa aktif berbakti dalam pembangunan keluarga, masyarakat serta berpartisipasi pembangunan nasional.

Semangat pengabdian konsolidasi dan pengembangan organisasi telah dirintis sejak berdirinya PWRI 24 Juli 1962 oleh para anggotanya yang terus ditindaklanjuti sampai terbentuk kepengurusan di 34 provinsi.

“Untuk itu, PWRI mendukung para anggota untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Dewa Made Indra mengukuhkan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) masa bakti 2017-2022 yang diketuai oleh IBM Bagus Kusuma Penson. (ant)

Jerman Puji Kesiapsiagaannya Bali Dalam Penanggulangan Bencana

Delegasi Penanggulangan Bencana Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman memuji kesiapsiagaannya yang telah dilakukan berbagai pemangku kepentingan di Bali dalam penanggulangan bencana.

“Kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah semata. Namun, diperlukan sinergitas semua komponen yang ada, termasuk di dalamnya masyarakat, pihak swasta dan media dalam upaya menciptakan ketangguhan dalam menghadapi bencana,” kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat menerima kunjungan dari Delegasi Penanggulangan Bencana Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, di Denpasar, Jumat.

Menurut Cok Ace, Bali sebagai daerah pariwisata dunia, kesiapsiagaannya dalam penanggulangan bencana menjadi per-

hatian utama guna memberikan rasa nyaman dan aman bagi para wisatawan.

“Kami secara rutin melakukan simulasi kesiapsiagaannya terhadap bencana, koordinasi dan komunikasi serta edukasi kepada masyarakat dalam meminimalisasi risiko akan kebencanaan gencar kami lakukan,” ujarnya yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Dengan demikian, lanjut dia, semua pihak menjadi paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, dan diharapkan dapat mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa.

Sementara itu, Kepala Staf Crisis Response Centre yang memimpin rombongan Delegasi Penanggulangan Bencana Kemenlu Jerman, Tina Debenham, menyampaikan pujiannya akan berbagai langkah kesiapsiagaannya yang telah dilakukan Bali.

“Ke depan, kami tertarik dan siap untuk melakukan kerjasama dalam bidang penangu-



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat menerima kunjungan dari Delegasi Penanggulangan Bencana Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman (Antaraneews Bali/Humas Pemprov Bali)

langan bencana dengan Bali, sehingga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan khususnya terkait penanganan kebencanaan,” ucapnya, didampingi Konsul Jerman untuk Bali, Robert Jantzen.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali I Made Rentin

menambahkan, Pemprov setempat telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan ketangguhan serta kesiapsiagaannya masyarakat dalam menghadapi bencana.

Secara rutin, BPBD Bali bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan simulasi kesiapsiagaannya bencana seperti gempa bumi dan tsunami. (ant)

Hasilkan “Denpasar Commitment”, Denpasar Terima Penghargaan Internasional OWHC



Sekjen OWHC Dennis Richard (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang diterima Wali Kota IB Rai Dharmawijaya Mantra di Sanur, Bali. (Antaraneews Bali/Humas Pemkot Denpasar)

Komitmen Pemerintah Kota Denpasar, Bali, dalam mendukung kelestarian warisan budaya menerima apresiasi dan penghargaan dari Sekjen OWHC Dennis Richard yang diserahkan kepada Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, pada acara International Conference OWHC Eur-

asia IX di Prama Sanur Beach Hotel. Selain itu, konferensi internasional itu juga menghasilkan “Denpasar Commitment” (Komitmen Denpasar).

Keterangan pers dari Humas Pemkot Denpasar yang diterima, Kamis, melaporkan Sekjen OWHC Dennis Richard mengatakan bahwa Pemerin-

tah Kota Denpasar telah sukses dan berkomitmen tinggi dalam mendukung kelestarian warisan budaya.

“Penguatan budaya Subak di Bali, dan pengembangan kota pusaka di Kota Denpasar sangat baik. Kota ini berhasil dengan program-program positif di bidang tersebut,” ujarnya.

Dennis Richard menilai Kota Denpasar juga memiliki infrastruktur kota pusaka dengan ornamen-ornamen khas Bali yang sangat terjaga, sehingga menjadi daya tarik wisatawan.

Sebelumnya, Pemkot Denpasar dinilai sukses menggelar “Conference Strategic Meeting OWHC Asia Pasific 2016”, kini dunia internasional kembali mengapresiasi dengan mempercayai Denpasar sebagai tuan rumah penyelenggaraan International Conference OWHC

Eurasia IX.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra berterima kasih atas penghargaan atau apresiasi yang diberikan dari OWHC.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi ini, sebuah penilaian dari dunia internasional yang wajib kita syukuri, karena memang selama ini kami sangat konsen dengan penguatan pariwisata berbasis budaya,” katanya.

Ke depan juga menjadi motivasi agar seluruh jajaran dan masyarakat Kota Denpasar terus bersinergi dan kolaborasi dalam menjaga budaya warisan. “Ini adalah penghargaan saya persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar, karena selama ini telah mencintai budaya kita bersama,” katanya. (ant)

Pemkot Denpasar Kunker ke Bandung Pelajari Penataan Taman Kota

Pemerintah Kota Denpasar, Bali melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung untuk mengenal lebih dekat pembuatan taman kota dan gedung Kreatif Hub guna meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Rombongan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, mengatakan kegiatan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan perwakilan media di Bali guna mengenal lebih dekat pembuatan taman dan gedung Kreatif Hub.

“Kunjungan kerja (Kunker) kami selama tiga hari ke Kota Bandung guna mempelajari pembuatan taman kota yang rindang dan indah. Saat ini Denpasar sedang membuat taman, akan tetapi belum bisa serindang taman yang ada di Kota Bandung,” kata Rai Iswara yang didampingi Asisten I Kota Denpasar Made Toya, serta Kabag Humas dan Protokol Dewa Gede

Rai.

Ia mengatakan Kota Denpasar sudah mulai membuat taman kota, tetapi belum bisa mengejar keindahan taman di Kota Bandung.

“Saat ini kami sudah menata taman sepanjang jalan bebas hambatan (bypass), aliran sungai, namun belum bisa seperti indahnya Kota Bandung,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga membangun gedung balai budaya di kawasan Lumintang yang sempat mangkrak dan akan dijadikan semacam kreatif hub.

“Kami membangun gedung yang mengarah ke kreatif hub, seperti yang ada di Bandung yakni Bandung Creative Hub. Pembangunan gedung itu memang mengarah kesana yang akan dijadikan tempat untuk menuangkan kreativitas dalam meningkatkan kualitas masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Pembangunan Kota Band-



Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara tukar cinderamata dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Pembangunan Kota Bandung Dodi Ridwansyah saat acara kunker tersebut. (Antaraneews Bali/Humas Pemkot Denpasar/2019)

ung Dodi Ridwansyah mengatakan telah melakukan penataan taman sejak tahun 2014. Pada saat itu secara perlahan-lahan membangun taman-taman yang ada di Kota Bandung.

“Kota Bandung memiliki 29 taman tematik yang dibangun mulai tahun 2014, termasuk Taman Lansia, dan Taman Jomblo. Saat ini jumlah total 688 taman. Karena banyaknya sampai sulit kita menamakan taman terse-

but,” ucapnya.

Kepala Bidang Pertamanan DPKP3 Bandung Iwan Sugiono mengatakan setiap rukun warga (RW) juga memiliki taman yang kini berjumlah 206 atau baru terealisasi 14 persen dari total RW yang ada di Kota Bandung.

“Sedangkan jumlah ruang terbuka hijau sebanyak 12 persen dan kami mencanangkan setiap tahun ada penambahan 0,2 persen RTH,” katanya. (ant)

Disperindag Denpasar Gelar Pasar Murah



Wawali Kota Denpasar IGN Jaya Negara meninjau pasar murah yang digelar Disperindag saat bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. (Antaraneews Bali/Humas Pemkot Denpasar/2019)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, Bali menggelar pasar murah di Pasar Pidada serangkaian bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

Kegiatan pasar murah yang dilakukan Disperindag itu ditinjau Wakil Wali Kota (Wawako) Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Rabu.

Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Denpasar, Ida Bagus Anom Suniem mengatakan pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihaknya melaksanakan delapan kali pasar murah di seluruh kecamatan di Kota Denpasar secara berkelanjutan.

Ia menambahkan kegiatan ini juga untuk menekan inflasi sehingga pihaknya dalam kegiatan

ini berkolaborasi dengan TPID Kota Denpasar.

Kegiatan pasar murah ini untuk memastikan harga bahan kebutuhan pokok harganya sangat terjangkau karena langsung melibatkan distributornya seperti Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Hiswana Migas, PT Halus Ciptanadi, Pertamina, PT GIEB Indonesia, PT Tira Dewata, Bu Komang Pedagang Buah, CV Ayu Nadi, dan Level 21.

Lebih lanjut, ia meminta kepada masyarakat tidak menggunakan kantong plastik, karena pihaknya juga melibatkan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kota Denpasar untuk memberikan tas ramah lingkungan kepada para pembeli.

Dengan pasar murah ini, Suniem berharap bisa menekan kenaikan harga barang, karena sebelum di laksanakan pasar murah harga di pasar seperti bawang merah dan bawang putih men-

alami kenaikan harga yang signifikan.

Wawako Denpasar Jaya Negara menyebutkan dengan berbagai upaya dilakukan memastikan bahan kebutuhan pokok dalam pasar murah harganya sangat terjangkau dan terbilang sangat murah dibandingkan harga di pasaran.

Menurutnya harga bisa terjangkau karena Pemerintah Kota Denpasar langsung bekerja sama distributor. "Harganya sangat terjangkau seperti halnya beras C4 di pasaran dijual Rp55 ribu dalam pasar murah ini masyarakat bisa membeli dengan harga Rp50 ribu. Sehingga masyarakat bisa hemat Rp5 ribu untuk beli beras," ujarnya.

Dengan dilaksanakan pasar murah ini, ia berharap dapat menekan kenaikan harga pada saat bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta menekan terjadinya inflasi di Kota Denpasar. (ant)

Ramadhan, TPID Denpasar Antisipasi Lonjakan Harga

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar, Bali menggelar rapat guna mengevaluasi kesiapan dan mengantisipasi lonjakan harga barang pada bulan Ramadhan serta menjelang hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Sekretaris Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara di Denpasar, Kamis, mengatakan rapat ini bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian dan menekan inflasi di Kota Denpasar saat bulan puasa dan menjelang Idul Fitri.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Polresta Denpasar, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta instansi terkait lainnya.

Rai Iswara lebih lanjut mengatakan berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar di antaranya berkoordinasi dengan Perum Bulog, PPI, Pertamina serta pihak terkait lainnya. Selain itu juga me-

nyelenggarakan pasar murah di empat kecamatan, operasi pasar hingga menjaga kualitas pangan yang dijual dengan melaksanakan pengecekan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami telah mempersiapkan berbagai program guna menjaga stabilitas harga di pasaran, tentunya dengan berbagai kerja sama dan komunikasi lintas sektoral melalui TPID Denpasar siap antisipasi lonjakan harga di bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.

Sekda Rai Iswara lebih lanjut mengatakan rapat ini bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian dan menekan inflasi di Kota Denpasar. Adapun berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar di antaranya sering berkoordinasi dengan Bulog, PPI, Pertamina serta pihak terkait lainnya, menyelenggarakan Pasar Murah di 4 Kecamatan, Operasi Pasar hingga menjaga kualitas pan-



Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara bersalaman dengan peserta rapat TPID Denpasar. (Antaraneews Bali/Humas Pemkot Denpasar/2019)

gan yang dijual dengan melaksanakan pengecekan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami telah mempersiapkan berbagai program guna menjaga stabilitas harga di pasaran, tentunya dengan berbagai kerja sama dan komunikasi lintas sektoral melalui TPID Denpasar siap antisipasi lonjakan harga di Bulan Ra-

madhan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti," katanya.

Rai Iswara mengatakan berbagai langkah telah dilakukan untuk menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga. Berbagai langkah yang dilaksanakan yaitu pertama TPID Kota Denpasar setiap saat melakukan pemantauan harga langsung ke pasar tradisional hingga modern. (ant)

Badung Canangkan “Garba Sari” Demi Cegah “Stunting”



Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua TP PKK Badung, Ny Seniasih Giri Prasta menghadiri pencanangan “Garba Sari” untuk mencegah Stunting pada anak di balai pesamuhan banjar Delod Sema, Desa Kekekan, Kecamatan Mengwi, Badung, Jumat (10/5). Antaranews Bali/Humas Badung

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bali, mencanangkan Gerakan Badung Sehat pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Garba Sari) untuk mencegah stunting atau lam-

bat pertumbuhan pada anak di wilayah tersebut.

“Ini adalah tugas pemerintah juga untuk menjaga masyarakatnya hidup sehat dan layak, oleh karena itu kami

mencanangkan gerakan ini,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, di Desa Kekekan, Kecamatan Mengwi, Badung, Jumat.

Ia mengatakan, gerakan itu merupakan bagian dari pencegahan agar masyarakat di Kabupaten Badung tidak mengalami gizi buruk selama masa 1.000 hari kelahiran pertama.

“Gerakan ini akan dilakukan di semua desa sehingga nantinya masyarakat di Kabupaten Badung sehat dan memiliki generasi yang berkualitas dan apa yang kami cita-citakan yaitu Badung menjadi hebat bisa terwujud,” katanya.

Terkait kasus stunting di wilayah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menjelaskan, kasus stunting sangat kecil terjadi di Badung. Namun, menurutnya meskipun kecil, tapi hal itu harus ditekan hingga menjadi nol persen.

“Persoalannya sekarang, dari data Dinas Kesehatan,

bukan stunting yang banyak, tapi bayi obesitas karena gizinya terlalu baik. Jadi kami juga perlu tangani masalah obesitas bayi sejak dini dan kami juga sudah gerakkan tim posyandu di setiap banjar di Badung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Badung, Gede Putra Suteja mengatakan, pencanangan “Garba Sari” tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi dengan prioritas 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting.

“Selain mencegah stunting, ini merupakan upaya kami untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan yang menyasar enam kecamatan di Kabupaten Badung dengan 16 kelurahan serta 46 desa tersebut dapat dituntaskan pada tahun 2020. (adv)

Wabup Badung Serahkan SK Pengangkatan CPNS

Wakil Bupati (Wabup) Badung, Bali, I Ketut Suiasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Badung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Badung dari program Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2019 kepada 19 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Penyerahan SK CPNS ini merupakan wujud penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, atas dedikasi dan perjuangan para bidan yang telah mengabdikan dirinya sebagai bagian dari pelayanan pemerintah di bidang kesehatan,” ujar Suiasa di Mangupura, Kamis.

Ia menambahkan, dengan penghargaan yang diserahkan melalui SK CPNS ini, berarti bidan yang menerima SK

sudah berstatus calon pegawai negeri sipil. Untuk itu penghargaan tersebut harus dijawab dengan bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab.

“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, apalagi para bidan ini berbuat untuk keberlangsungan manusia. Mereka yang akan menjaga dan merawat manusia dalam bidang kesehatannya itu sendiri,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badung, I Gede Wijaya menyebutkan, dalam kesempatan itu diserahkan surat keputusan Bupati Badung tentang pengangkatan CPNS Kabupaten Badung, bagi pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2016 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan SK CPNS Kabupaten Badung kepada 19 Bidan PTT di Puspem Badung, Mangupura, Kamis (9/5). Antaranews Bali/Humas Badung

penetapan NIP dari Badan Kepegawaian Regional X.

“Pelaksanaan SK Bupati Badung tentang pengangkatan CPNS Kabupaten Badung ini dilakukan oleh Bupati

Badung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kepada 19 orang calon PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya. (adv)

Kapolda Bali-Bupati Badung Resmikan Gedung Baru Polsek Kuta Selatan



Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose disaksikan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (kedua kanan) dan Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan (kanan) menandatangani prasasti saat peresmian Kantor Polsek Kuta Selatan, Badung, Rabu (8/5). *AntaraneWS Bali/Humas Pemkab Badung*

Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose didampingi Wakapolda Bali, Wayan Sunartha, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wabup Badung I Ketut Suisa serta Kapolresta Denpasar, Ruddi Setiawan, meresmikan gedung baru Kantor Polsek Kuta Selatan, di kawasan Nusa Dua, Badung (8/5).

“Sebagai Kapolda Bali, saya sangat berterima kasih tentunya kepada Bapak Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta beserta, jajaran terutama jajaran Pemkab Badung,” ujar Kapolda Petrus Reinhard Golose dalam keterangan pers yang diterima, Kamis.

Pembangunan gedung baru Polsek Kuta Selatan tersebut

menghabiskan dana sekitar Rp8,9 miliar yang merupakan dana hibah Pemkab Badung dan menempati tanah milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan dihibahkan penggunaannya untuk dibangun gedung baru.

“Tidak gampang untuk mengeluarkan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur itu ada prosesnya, karena ini uang rakyat yang dibagikan kembali untuk kepentingan rakyat,” kata Kapolda Petrus Reinhard Golose.

Untuk itu, pihaknya berharap seluruh personel Polda Bali, khususnya personel Polsek Kuta Selatan yang menempati gedung baru ini agar memanfaatkannya dengan baik dengan tanggung jawab moril maupun materil yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

“Personel harus melakukan

pendekatan dengan hati nurani serta tegas menindak kejahatan dan pelanggaran yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Bali karena selama ini jajaran Polda Bali benar-benar melaksanakan tindakan cipta kondisi, melakukan pembinaan hukum dan penegakan hukum dengan baik.

“Kami melihatnya secara riil, salah satu contoh bagaimana pembinaan yang dilakukan, anti preman dan narkoba, jelas ini dilakukan kepada siapapun yang melanggar,” katanya.

Terkait dengan sarana dan prasarana, menurutnya, Pemkab Badung akan selalu mendukung terlebih regulasi yang ada telah memungkinkan dan membolehkan Pemkab Badung untuk membantu lembaga vertikal. (adv)

TPID Badung Bahas Pengendalian Inflasi Jelang Lebaran

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali, menggelar rapat High Level Meeting untuk membahas sekaligus mengevaluasi kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Badung menjelang hari raya.

“Rapat ini kami lakukan juga untuk mengantisipasi lonjakan harga pada bulan puasa, menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim dan Hari Saraswati, Hari Raya Pagerwesi, Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suisa, di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, pertemuan yang rutin digelar setiap tahun itu guna membahas upaya-upaya pengendalian dan menekan inflasi di wilayah Kabupaten Badung.

Menurutnya, ada tiga hal besar yang berdampak pada inflasi daerah yaitu, mengenai ketersediaan dan dasar produksi, distribusi dari ketersediaan produksi

dan pengendalian harga.

“Memang dalam penanganan inflasi ini yang terpenting juga diperhatikan adalah bagaimana kesesuaian antara kebijakan strategis kami dalam TPID dengan faktor-faktor penyebab inflasi tersebut,” katanya.

Wabup Suisa mengharapkan, kedepannya produksi kebutuhan pokok yang belum dapat dipenuhi baik dari perikanan maupun dari pertanian agar dapat semaksimal mungkin terus dilakukan upaya peningkatan produksinya, khususnya produksi cabe di Badung sehingga dapat memberdayakan petani dan menekan harga.

“Selain itu perlu juga membuat konten TPID di Kominfo guna menyampaikan informasi perkembangan persediaan dan harga untuk dipublikasikan kepada masyarakat sebagai sosialisasi kondisi kebutuhan pokok dan juga harganya kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suisa (tengah) memimpin rapat bersama TPID Kabupaten Badung sekaligus mengevaluasi kegiatan pengendalian inflasi di Kabupaten Badung, Rabu (8/5). *AntaraneWS Bali/Humas Badung*

Pusat Statistik Badung, Ni Putu Minarni menjelaskan, perkembangan indeks konsumen/inflasi per bulan April 2019 bahwa inflasi secara nasional per April sebesar 0,44 persen, inflasi tahun kalender 0,80 persen dan inflasi year to year (yoy) 2,83 persen.

Sementara potensi inflasi di Bali khususnya Denpasar dan Singaraja masih di bawah nasional. Menurutnya, ada tujuh kelompok penyebab inflasi diantaranya, bahan makanan,

makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, perumahan, listrik, gas, bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi komunikasi dan jasa keuangan.

Sebagai salah satu upaya menstabilkan harga, Pemkab Badung akan melakukan operasi pasar sebanyak tiga kali, yaitu pada 10 Mei mendatang di Desa Taman, Abiansemal, 24 Mei di Dalung, Kuta Utara dan 27 Mei di Kelurahan Benoa wilayah Kuta Selatan. (adv)

Badung Optimistis Angka Kemiskinan Turun Nol Persen



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa Suiasa (kiri) membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2019 di Puspem Badung, Bali, Selasa (7/5/2019). (Antaraneews Bali/Humas Badung)

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen dan optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun ke depan.

“Dalam visi misi daerah, penanggulangan kemiskinan masyarakat di Badung sudah menjadi prioritas. Untuk

itu pada anggaran perubahan 2019 dan induk 2020, kami akan melakukan kebijakan politik anggaran untuk menekan angka kemiskinan menjadi nol koma sekian persen,” ujar Wabup Badung, I Ketut Suiasa, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Badung tahun 2019 di Mangu-pura, Selasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Badung mencatat angka kemiskinan di Badung sesuai data sebesar 1,98 persen berdasarkan analisis makro.

Wabup Suiasa mengakui memang ada perbedaan data antara BPS dengan data mikro yang dimiliki Pemkab Badung. Menurutnya, perbedaan data itu sepakat untuk dihormati karena baik BPS maupun Pemkab Badung memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan angka kemiskinan.

Ia mengatakan analisis makro BPS mencakup seluruh masyarakat yang hidup di Badung dan mencatat data makro penduduk Badung sekitar 650 ribu.

Sementara data mikro yang dimiliki Pemkab Badung berdasarkan penduduk yang ber-KTP Badung dan mengacu pada

pendataan Dinas Kependudukan dan Capil terdapat 465 ribu jiwa.

“Angka kemiskinan 1,98 tersebut berdasarkan jumlah penduduk dari data makro BPS, bila dibandingkan dengan pendataan Pemkab, berarti penduduk miskin di Badung berada di bawah angka 1,98 persen,” katanya.

Ia menjelaskan dari sisi politik anggaran, di samping menggunakan anggaran APBD, juga menggunakan dana APBDes. Bagi desa yang masih mempunyai Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus menganggarkan sekurang-kurangnya lima persen untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan diharapkan untuk data bagi forum CSR di Badung.

“Dengan pola ini kami optimis dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Badung,” kata Wabup Ketut Suiasa. (adv)

Badung-BI Kembangkan Komoditas Ayam Pedaging

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menandatangani kesepakatan bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terkait pengembangan klaster ketahanan pangan sektor komoditas ayam pedaging di wilayah Kabupaten Badung.

“Ini merupakan langkah awal dan kami BI bekerja berdasarkan undang-undang tersendiri, dimana salah satu amanah kami adalah menjaga stabilitas harga, baik di level nasional maupun di daerah,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Causa Iman Karana di Mangu-pura, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan ketahanan pangan pada sektor ayam pedaging.

Menurutnya, salah satu strategi dalam menjaga stabilitas harga yaitu menjaga ketersediaan barang, salah satu yang per-

lu dijaga yaitu produksinya.

“Dari pengamatan dalam rapat-rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), salah satu penyebab inflasi di Bali adalah ayam pedaging,” katanya.

Pihaknya melihat Kabupaten Badung memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk mengembangkan produksi komoditas ayam pedaging.

“Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Badung dengan kelompok taninya serta dukungan dari DPRD Badung atas terjalinnya kerja sama dan kesepakatan bersama ini,” kata Causa Iman Karana.

Dalam kesempatan itu, penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana yang didampingi Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Sapto Widyatmiko.



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (tengah) berfoto usai melaksanakan penandatanganan MoU dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana (kiri) didampingi Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Sapto Widyatmiko di Puspem Badung, Senin (6/5). (Antaraneews Bali/Humas Badung)

Bupati Giri Prasta mengatakan, dengan dilaksanakannya MoU bersama BI ini, diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Badung serta menciptakan lapangan pekerjaan khususnya pada sektor ayam pedaging.

Ia menambahkan, Pemkab Badung selalu mengacu kepada

program Nawacita Presiden Joko Widodo yang dirinci menjadi lima program prioritas, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) lengkap dengan infrastrukturnya.

Untuk saat ini, ia mengatakan 90 persen kebijakan Pemkab Badung telah memasuki tatanan ekonomi dan pangan merupakan dasar, industri adalah tulang punggung. (adv)

170 Kepsek se-Badung Ikuti Penguatan Kompetensi



Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Badung, I Ketut Widia Astika, berbincang dengan peserta Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Kabupaten Badung tahun 2019, di Denpasar, Selasa. *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Sebanyak 170 orang Kepala Sekolah tingkat TK, SD dan SMP se-Kabupaten Badung, Bali mengikuti penguatan kompetensi kepala sekolah yang diadakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) setempat.

“Kegiatan ini akan memberi-

kan pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial para kepala sekolah,” ujar Ka-

dis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Badung, I Ketut Widia Astika, di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga pendidik yang profesional yang mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan dan karakter peserta didik.

“Menjadi tenaga pendidik yang profesional akan terwujud bila ada upaya untuk meningkatkan peran serta dan dukungan dari kepala sekolah,” katanya.

Menurutnya, kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting khususnya bagi para kepala sekolah yang telah diangkat dan belum memiliki sertifikat nasional.

“Oleh karena itu, kami harap

para kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini benar-benar mau belajar, mau berubah dan mau meningkatkan kompetensi mereka dalam rangka untuk mengembangkan sekolah lebih baik,” kata Ketut Widia Astika.

Ia menambahkan, kedepannya diharapkan secara keseluruhan kompetensi kepala sekolah di Badung merata sehingga nantinya tidak ada sekolah yang tidak unggul.

“Setelah mengikuti kegiatan ini peserta akan mendapatkan sertifikat nasional yang diharapkan dapat membuat mereka lebih semangat dan berpacu bersaing berkompetisi untuk mengembangkan sekolah mereka masing-masing sehingga seluruh sekolah di Badung adalah sekolah unggul yang nantinya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas,” ujarnya. (adv)

Wabup Badung: Pemerintah-Masyarakat-Pengusaha Harus Sukseskan Pendidikan

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa mengatakan semua “stakeholders” (pemangku kepentingan) yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu pemerintah, guru, tenaga kependidikan, masyarakat maupun pengusaha harus saling bersinergi dan membangun komunikasi yang produktif untuk menyukseskan proses penyelenggaraan pendidikan.

“Stakeholders yang berkaitan dengan pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan formal yang sama dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Wabup Suiasa, saat upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 di Lapangan Puspem Badung, Mangupura.

Sinergitas stakeholders pendidikan tersebut juga di-

harapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu serta melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektualitas, kualitas emosional dan kualitas spiritual.

“Tiga kualitas pendidikan ini yang harus dimiliki oleh para anak didik kami,” kata Wabup Ketut Suiasa.

Wabup Suiasa yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menekankan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sektor pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan hal itu maka peringatan Hardiknas tahun 2019 mengambil tema “Menguatkan



Wabup Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan penghargaan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi saat apel Peringatan Hari Pendidikan Nasional dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun 2019 di Lapangan Puspem Badung, Kamis (2/5/2019). *(Antaraneews Bali/Humas Badung)*

pendidikan, memajukan kebudayaan”.

“Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna meringkai hadirnya sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang

maju,” ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran pendidikan sebesar 63 persen dikelola daerah, oleh karena itu, upaya penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dapat berjalan secara optimal apabila pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan yang ada proaktif dan lebih aktif dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan. (adv)

Pelajari Mal Pelayanan Publik, Bondowoso Kunjungi Pemkab Badung



Kepala DPMPSTP Badung, I Made Agus Aryawan disaksikan Wabup Badung, I Ketut Suiasa memberikan penjelasan kepada Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Puspem Badung, Mangupura, Jumat (3/5). (Antaraneews Bali/Humas Badung)

Rombongan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jatim, melakukan kunjungan ke Kabupaten Badung, Bali, untuk melakukan studi referensi terkait layanan Mal Pelayanan Publik di wilayah Badung.

“Dari kunjungan ini kami harap bisa menjadi inspirasi Pemkab Bondowoso yang pada tahun

2020 nanti juga akan membangun mal pelayanan publik,” ujar Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat, di Mangupura, Jumat (3/5).

Dalam kunjungannya, rombongan Pemkab Bondowoso melakukan studi tiru di antaranya seperti bagaimana layout serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang nantinya bisa dimasukkan di dalam Mal Pelayanan Publik.

“Kami juga berterima kasih sudah mendapat penjelasan beberapa sistem yang sudah dibuat salah satunya sistem pelayanan daring yang dibuat oleh tim IT internal, sehingga nanti kami juga akan membangun Tim IT internal untuk menerapkan sistem daring tersebut,” kata Bupati Irwan Bachtiar.

Ia pun berharap, setelah ini nantinya jajaran Pemkab Bondowoso dapat melakukan studi tiru lanjutan dalam tahap pengembangan Mal Pelayanan Publik di Bondowoso.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa yang menerima rombongan Pemkab Bondowoso mengatakan, momen kunjungan itu tidak hanya merupakan sekadar kunjungan kerja, namun diharapkan dapat menjadi momentum menjalin silaturahmi

dari kedua daerah.

“Dari momen ini kami bersama Pemkab Bondowoso dapat saling bertukar pikiran dan saling berbagi dalam membangun dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya berharap dan mendoakan Pemkab Bondowoso juga dapat membangun Mal Pelayanan Publik di tahun 2020, sehingga nantinya Pemkab Badung juga bisa berkunjung kesana untuk melakukan studi referensi dan bertukar pikiran sehingga dapat membangun kerja sama antara Pemkab Badung dan Pemkab Bondowoso.

“Dalam hal pembangunan tentu harus melalui proses yang panjang dan juga harus memiliki komitmen dan integritas yang kuat serta adanya kerja sama dari berbagai pihak pemerintah maupun masyarakat,” ujar Suiasa. (adv)

Badung Dukung Kerja Sama Garuda Indonesia-PWA Korea

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendukung hubungan kerja sama yang dilakukan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan Pan World Asia (PWA) Korea.

“Pemkab Badung menyambut baik dan mendukung adanya niatan dari pihak PWA Group bersama Garuda Indonesia untuk bersama mempromosikan kepariwisataan kita di wilayah Bali,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, dalam keterangan Humas Badung yang diterima Antara di Mangupura, Kamis.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Korea khususnya juga untuk mendukung hotel-hotel dan atraksi wisata yang ada di wilayah Badung karena kerja sama itu diyakini akan mampu mendorong kunjungan wisata Korea ke Indonesia khususnya Bali dan Badung, begitu pula sebaliknya.

“Kami memberikan apresiasi

atas terlaksananya kerja sama ini. Kegiatan ini merupakan hasil peran serta dari semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Badung,” kata Wabup.

Ia mengatakan Pemkab Badung memang telah berupaya memediasi proses kerjasama PWA group dengan Garuda Indonesia yang prosesnya sudah berlangsung lebih dari dua bulan sebelum dilakukan perjanjian.

“Tentunya kami berada di tengah-tengah kedua pihak karena memang pertemuan mereka merupakan hasil mediasi kami dalam rangka membangun kepariwisataan. Terlebih kami memiliki kewajiban dan tugas untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan tingkat kepariwisataan di Bali,” ujarnya.

Ia menambahkan kerja sama antara PWA group dan Garuda Indonesia itu menurutnya merupakan cara yang efektif dan produktif dalam mengger-



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa (kedua kiri) saat menghadiri acara penandatanganan Kontrak Kerjasama antara Pan World Asia dan Garuda Indonesia, di Hotel Crystal, Kuta, Badung. Antaraneews Bali/Humas Badung

akkan pariwisata di Kabupaten Badung.

“Kami berharap jalinan kerja sama ini dapat berjalan berkelanjutan antara dua belah pihak serta memberikan imbas yang baik pada pembangunan masyarakat melalui pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan bersinergi,” kata Suiasa.

CEO PWA, Suh Sung Jin, mengatakan, maskapai pener-

bang Garuda Indonesia telah menerima banyak penghargaan seperti kelas ekonomi top dunia, dan pramugari terkemuka dunia dari organisasi terkenal.

“Menjadi mitra Garuda Indonesia adalah kesempatan besar bagi kami karena kami dapat berkontribusi dalam pengembangan kedua belah pihak melalui kerja sama ini,” katanya. (adv)

Telkomsel Serahkan Donasi ke Pesantren di NTT Lewat “Roadshow Ramadhan”



Management Telkomsel Area Jawa Bali, Regional Bali Nusra & Branch Kupang, menyerahkan donasi secara simbolis ke Pengurus Masjid Al Fatah di Kupang, NTT (9/5/2019). (Foto Antaranews/Humas Telkomsel Bali-Nusra/2019)

Operator jaringan seluler Indonesia, Telkomsel, untuk menyerahkan donasi ke Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "Nurul Musthofah" di

Ende, Nusa Tenggara Timur, 8 Mei 2019, lewat program "Roadshow Ramadhan 1440 Hijriah".

EVP Telkomsel Area Jawa

Bali, Agus Setia Budi, dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Senin, menjelaskan Telkomsel menyerahkan donasi untuk kebutuhan operasional pondok pesantren, dan uang saku kepada para santri serta berbagi sembako itu melalui roadshow "Sebarkan Kebahagiaan".

"Melalui kegiatan roadshow di bulan suci Ramadhan ini, Telkomsel ingin menyebarkan kebahagiaan bersama anak yatim, maupun para santri, serta pondok pesantren dan yayasan yang membutuhkan bantuan," katanya.

Kegiatan kepedulian sosial ini merupakan ungkapan syukur atas kepercayaan pelanggan dan masyarakat terhadap Telkomsel, sekaligus upaya

Telkomsel untuk memberi nilai tambah pada masyarakat dan lingkungan yang selalu mendukung Telkomsel dalam melayani Indonesia.

Selain itu, Telkomsel juga menyerahkan donasi ke beberapa masjid di wilayah Nusa Tenggara Timur, antara lain Masjid Al Mahdi di Ende (08/05) dan Masjid Al Fatah di Kota Kupang (09/05).

"Dengan adanya donasi tersebut, diharapkan dapat membantu kelancaran proses renovasi masjid dan bermanfaat untuk menambah kebutuhan perlengkapan masjid lainnya," kata Agus, didampingi Corporate Communications Bali Nusra I Telkomsel, Teni Ginaya. (adv)

23 Pegawai dan Dosen Undiksha Terima Satyalancana dari Presiden

Sebanyak 23 pegawai dan dosen Undiksha Singaraja menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden yang diserahkan Rektor Undiksha Prof. Dr. Nyoman Jampel saat apel peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kampus setempat (2/5).

"Ke-23 PNS di Undiksha yang mendapatkan tanda kehormatan itu telah menjalankan masa tugas 10 sampai 30 tahun," kata Rektor Undiksha Prof. Dr. Nyoman Jampel dalam keterangan pers yang diterima, Jumat.

Prof Jampel berharap seiring dengan lamanya waktu pengabdian di Undiksha hendaknya ada upaya peningkatan diri dari segi strata pendidikan maupun profesionalitas bekerja. "Meningkatkan kualitas diri dalam artian kalau belum doktor harus kuliah lagi, kalau belum profesional harus lebih profesional lagi," katanya.

Menurut Jampel, salah satu hal yang menjadi evaluasi dari Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dalam Hadiknas adalah menghadapi revolusi industri 4.0.

"Perguruan tinggi yang melaksanakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat harus dapat menggunakan teknologi informasi yang dipandang sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing," katanya.

Jampel mengatakan, proses pembejalaran online harus menjadi skala prioritas. Untuk menyambut kebijakan itu, Undiksha sudah melakukan revisi Kurikulum 2016 menjadi kurikulum yang berorientasi pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan kurikulum internasional.

Khusus terkait pembelajaran online, kata Jampel, di Undiksha sudah berjalan pada Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) kisaran 50 persen dan pelaksanaan workshop Pendidikan Profesi Guru (PPG) sudah 100 persen.

Pada tahun ajaran



Sebanyak 23 pegawai dan dosen Undiksha Singaraja menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden yang diserahkan Rektor Undiksha Prof. Dr. Nyoman Jampel (kanan) saat apel peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kampus setempat (2/5). (Foto Antaranews Bali/Humas Undiksha)

2019/2020, seluruh program studi dituntut melaksanakan minimal 25 persen mata kuliah. "Ini terus kami genjot untuk meningkatkan daya saing," tegasnya.

Di Kabupaten Tabanan, upacara peringatan Hardiknas Tahun 2019 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, juga

ditandai dengan adanya 300 orang yang diangkat menjadi CPNS dari Formasi Umum dan eks Tenaga Harian K2 tahun anggaran 2018.

"Tunjukkan rasa syukur saudara dengan bekerja secara sungguh-sungguh, tingkatkan loyalitas dan disiplin untuk mengabdikan kepada Pemerintah, Bangsa dan Negara," katanya. (ant)

Bupati Mahayastra Beri Truk Sampah Untuk Taman Kaja Ubud



Bupati Gianyar Made Mahayastra sedang tes truk sampah sekaligus menyerahkan bantuan tersebut. Foto Humas Gianyar

Pemkab Gianyar menghibahkan satu unit truk kebersihan kepada banjar Taman Kaja, Desa Ubud, karena Bupati Mahayastra memiliki kepedulian utama pada pengelolaan sampah yang baik di Gianyar.

"Taman Kaja memiliki komitmen kuat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih

dan asri. Program-program kebersihan sudah rutin dilaksanakan, seperti pengelolaan bank sampah oleh PKK setempat, gotong royong warga, dan swadaya kebersihan menggunakan mobil pikap. Karena swadaya yang ada terasa kewalahan, kami ajukan proposal untuk pengadaan truk sampah pada tahun 2018," kata Kepala

Lingkungan Taman Kaja Nyoman Wirnata, di Gianyar, Selasa.

Dalam siaran pers Diskominfo Gianyar disebutkan bahwa penyerahan hibah secara simbolis dilakukan Bupati Gianyar Made Mahayastra yang diterima oleh Kepala Lingkungan lan Kelian Adat Taman Kaja Nyoman Wirnata di areal Wantilan Pura Desa Taman Kaja (6/5).

Saat penyerahan hibah satu unit truk itu, Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan Taman Kaja merupakan banjar kecil yang memiliki masyarakat yang solid dan satu visi dalam membangun wilayahnya, karena itu ia tidak ragu dalam menggelontorkan bantuan demi kepentingan banjar setempat. "Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk lingkungan," tegas Bupati.

Selain itu, pertimbangan

letak Banjar Taman Kaja juga berada dalam wilayah daerah pariwisata di Ubud. "Ubud sebagai ikon pariwisata tidak boleh kumuh, harus bersih, bebas dari sampah plastik, limbah. Juga penataan kabel, kami rencanakan rampung tahun 2020. Agar tidak terkesan semrawut, dan setiap upacara adat agar tidak sampai listrik dimatikan," kata Bupati.

Bupati juga menyinggung soal pembangunan Pasar Ubud. Masyarakat setempat diminta untuk sedikit bersabar. Saat ini, Pemkab masih fokus terhadap revitalisasi Pasar Sukawati. "Pasti akan saya selesaikan perlahan-lahan," kata Bupati.

Bupati meminta agar truk sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Lingkungan di Taman Kaja menjadi semakin bersih dengan adanya truk sampah. (ant)

Respons Keluhan Masyarakat, Pemkab Gianyar Bentuk Tim Medsos

Pemkab Gianyar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk tim media sosial untuk memberikan respons yang cepat terhadap keluhan-keluhan masyarakat di media sosial.

"Pembentukan tim media sosial guna mempercepat informasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui media sosial, menangani keluhan masyarakat, serta meluruskan pemberitaan yang tidak benar (hoaks)," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, I Wayan Manik Suhartanta, di Gianyar, Rabu.

Pembentukan tim medsos yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Gianyar, Camat, BUMD dan RS Sanjiwani tersebut dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar, Cokorda Rai Widiarsa P di Ruang Sidang Kan-

tor Bupati Gianyar, 14 Mei 2019.

Tim ini terdiri dari utusan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Camat, BUMD, RSUD Sanjiwani yang nantinya mengelola media sosial masing-masing OPD.

"Dengan dibentuknya tim ini, akan memudahkan komunikasi antar instansi guna memberikan respon yang cepat terhadap keluhan-keluhan masyarakat di media sosial maupun klarifikasi terhadap hoaks," kata Manik Suhartanta.

Suhartanta juga mengatakan dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan bimbingan teknis aplikasi pengaduan LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dengan mendatangkan narasumber dari KemenPan/RB dengan kanal pengaduan lapor.go.id.

"Nanti pengaduan masyarakat di media sosial, kita juga akan integrasikan ke aplikasi tersebut," kata Manik Suhartanta.



Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Gianyar membentuk tim media sosial melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Foto Humas Gianyar

Kadis Cok Rai, panggilan akrabnya, mengatakan, berkembangnya media sosial sebagai sarana interaksi antar manusia telah membawa paradigma baru dalam proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat luas.

Pemerintah melalui penerbitan PermenPan dan RB No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan telah berupaya menyikapi fenomena yang terjadi. "Menyikapi hal tersebut,

Pemkab Gianyar berupaya membentuk tim reaksi cepat media sosial dan sekaligus admin lapor Aplikasi pelaporan online yang diluncurkan MenPan dan RB," tambah Cokorda Rai Widiarsa P.

Ditambahkan, tim ini nantinya mempunyai tugas utama untuk menjadi saluran (perantara) setiap laporan ke atasan yang bersangkutan di masing-masing OPD terhadap setiap keluhan masyarakat di media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. (ant)

Pemkab Klungkung Latih Anak Miskin Bekerja di Kapal Pesiar



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan Indonesia Institute for Social Development (IISD) bekerja sama dengan Aliansi Bupati-Walikota Indonesia Peduli KTR di Jakarta, Selasa (8/1/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, melatih 20 anak dari keluarga miskin (KK miskin) untuk bekerja di kapal pesiar yang merupakan kerja sama antara Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung.

Informasi yang diterima dari

Humas Pemkab Klungkung, Sabtu, menyebutkan Pelatihan Tenaga Kerja Keluar Negeri yang dibuka Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta pada Hari Pendidikan Nasional (2/5) itu akan berlangsung selama tiga bulan di kampus sekolah tinggi itu dan praktek selama dua bulan di hotel.

“Itu merupakan komitmen

kami dalam menuntaskan KK miskin yang ada di Kabupaten Klungkung serta langkah untuk mempercepat proses keberangkatan anak KK miskin bekerja ke kapal pesiar,” kata Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dalam pembukaan pelatihan yang juga dihadiri Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Dewa Gede Ngurah Byomantara.

Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung I Gede Kusumajaya di ruang rapat Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung itu, Bupati Klungkung meminta peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya dan tentunya jangan nanti sampai ada yang tidak serius.

“Setelah nantinya selesai mengikuti proses pelatihan, peserta bisa terjun langsung ke lapangan menyambut tamu

yang datang berkunjung ke Kerta Gosa maupun Monumen Puputan Klungkung sambil belajar Bahasa Inggris. Manfaatkan pelatihan ini dengan niat yang sungguh-sungguh agar perjuangan kalian tidak sia-sia,” katanya.

Bupati juga meminta kepada para peserta yang sudah lolos seleksi ini nantinya bisa selalu menjaga penampilan dan kerapian di dalam mengikuti pelatihan. “Jaga penampilan dan kerapian diri masing-masing dengan baik,” katanya.

Selain itu, Bupati juga menambahkan agar masyarakat yang berminat bisa melapor ke Perbekel masing-masing untuk mendapat tindak lanjut dalam proses pendaftaran.

“Saya sudah tugaskan Dinas terkait agar bekerja sama dengan Perbekel mengurus pendaftaran ketika masyarakat yang nantinya masih ada mengikuti seleksi,” katanya. (ant)

Bupati Suwirta Terima Tim Kemenkopolhukam Pantau Pulau-Pulau Kecil

Tim Desk Wilayah Perbatasan (Wiltas) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Klungkung.

Rombongan yang dipimpin Asisten Deputi Wilayah Perbatasan Tata Ruang Kemenkopolhukam Yasid Sulistya, diterima Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu.

“Kedatangan kami untuk memantau perkembangan pulau-pulau kecil yang merupakan Kawasan Strategis Tertentu (KST), khususnya di bidang pertahanan dan kedaulatan. Jangan sampai pulau kecil terluar kita hilang karena abrasi atau di kuasai negara lain. Disini kami ingin melihat bagaimana pengelolaannya dan apa yang harus

kita benahi,” kata Sulistya.

Ia mengatakan, kunjungan ini merupakan rangkaian dari program kerja tim Kemenkopolhukam, dalam rangka pemantauan lapangan terkait implementasi kebijakan pulau-pulau kecil terluar, guna memperoleh data faktual tentang kondisi pertahanan dan keamanan untuk sinkronisasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Dalam kunjungan ini, pihaknya melihat langsung pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang ada di wilayah Provinsi Bali, khususnya di Kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Seperti diketahui, Kepulauan Nusa Penida belakangan ini menjadi salah satu daerah yang menjadi daya tarik wisata yang menjadi tujuan utama wisata di Kabupaten Klungkung.

Menurutnya, kunjungan ini



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menerima tim dari Kementerian Polhukam berkaitan dengan pulau terluar seperti Nusa Penida, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Rabu (15/5). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung/2019)

menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dalam penanganan pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Klungkung.

Dalam kesempatan itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, kabupatennya memiliki luas wilayah terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabu-

paten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Luas wilayah Kabupaten Klungkung sekitar 315 kilometer persegi atau 31.500 hektare, dimana sepertiganya terletak di Klungkung daratan (112,16 kilometer persegi dan dua pertiganya di Kepulauan Nusa Penida (202,84 kilometer persegi). (ant)

Wabup Bangli Hadiri Penglukatan Agung Banyu Pinaruh

Wakil Bupati (Wabup) Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Sariasih Sedana Arta, menghadiri Penglukatan Agung Banyu Pinaruh yang diselenggarakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), Minggu

Acara yang dipusatkan di Pura Taman Sari, Desa Pakraman Sidembunut, dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Temuku, dari Gria Jaksa Manuaba, Banjar Pande Bangli. Acara ini juga dihadiri oleh puluhan peserta dari perwakilan siswa SMA/K dilingkungan Kota Bangli dan masyarakat umum.

Wabup Sedana Arta pada kesempatan itu mengatakan penglukatan agung yang diselenggarakan seragkaian Hari Saraswati dan Banyu Pinaruh itu merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bangli.

Menurut dia, kegiatan ini meru-

upakan implementasi dari dukungan terhadap visi misi Gubernur Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang dalam hal ini adalah Jana Kerthi dan Atma Kerthi.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Bangli sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan seperti ini. Ia juga mengaku siap memberi dukungan terhadap kegiatan ini, sehingga ke depan penglukatan agung Banyu Pinaruh yang dikomandoi oleh PHDI Bangli, bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih besar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli, saya sampaikan apresiasi kepada PHDI atas terlaksananya penglukatan agung hari ini. Kedepan Pemerintah Kabupaten Bangli siap memberikan dukungan, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan,” kata Wabup Sedana Arta.

Sementara itu, Ketua PHDI Bangli Nyoman Sukra menjelas-



Upacara Penglukatan Agung Banyu Pinaruh yang diselenggarakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli bekerjasama dengan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN). Humas Bangli

kan, berdasarkan keyakinan Hindu, Banyu Pinaruh berasal dari kata Banyu berarti air dan pinaruh artinya pangewruh atau pengetahuan. Secara filosofi Banyu Pinaruh bermakna membersihkan atau menyucikan diri dengan air ilmu pengetahuan, karena memang pikiran yang kotor atau kegelapan hanya bisa dibersihkan dengan pengetahuan suci.

Menurut Nyoman Sukra, dahulu sebelum adanya kegiatan penglukatan agung banyu pinaruh, umumnya masyarakat melakukan kegiatan pengeluktan sendiri-sendiri. Baik itu ke pesucian, danau, ke sumber mata air dan ada juga yang ke laut. Bagi yang ingat, mereka sekedar bawa canang, terus dihaturkan, setelahnya langsung mandi. (ant)

Kado HUT ke-815, Pemkab Bangli Berpredikat UHC

Masyarakat Kabupaten Bangli patut bersyukur atas resminya berpredikat Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bangli dengan BPJS Kesehatan di lapangan Kapten Mudita Bangli, Jumat, yang menjadi kado HUT Bangli ke-815.

Penandatanganan tersebut disertai dengan penyerahan piagam penghargaan dari BPJS Kesehatan kepada Pemkab Bangli yang diserahkan langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan untuk Wilayah Bali NTT, NTB, Made Puja Yasa. Sedangkan yang menandatangani PKS adalah Bupati Bangli I Made Gianyar dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak.

“Ini berarti, kini masyarakat Bangli dapat memanfaatkan program JKN-KIS untuk men-

jamin kesehatan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan ke Puskesmas maupun rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga membuktikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang tidak main-main dalam menjamin kesehatan masyarakatnya,” kata Bupati Bangli I Made Gianyar.

“Kami ingin masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan saat mereka sakit, kami ingin mereka bahagia saat ke puskesmas maupun rumah sakit, oleh karena itu kami bersama dengan BPJS Kesehatan selalu berkoordinasi dengan baik dan dihasilkanlah komitmen ini yang dituangkan dalam PKS,” kata Bupati.

Selain itu, ia juga ingin penyerahan piagam dan plakat predikat UHC dari BPJS Kesehatan benar-benar dimaknai bukan hanya sebuah piagam saja namun lebih kepada implementasinya, luar biasanya piagam ini harus diimplementasikan betul



Deputi Direksi BPJS Kesehatan untuk Wilayah Bali NTT, NTB, Made Puja Yasa (baju hitam) menyerahkan penghargaan predikat UHC kepada Bupati Bangli I Made Gianyar (baju putih). Foto Humas Bangli

oleh Pemkab Bangli dan BPJS Kesehatan untuk masyarakat agar benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Sementara itu, I Made Puja Yasa menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bangli. Predikat UHC ini menjadi kado spesial bagi masyarakat Bangli. Pemkab Bangli menunjukkan sisi kehadiran mereka bagi masyarakatnya dalam hal akses pelayanan kesehatan.

“Sebelumnya, kami ucapkan

selamat hari jadi kota Bangli yang ke-815, semoga kado spesial ini dapat mewujudkan Bangli yang Santhi dan Jagaditha,” katanya.

Penandatanganan PKS ini adalah merupakan tindak lanjut dari PKS ditingkat provinsi Bali, PKS ini berlaku dari 1 Januari 2019 dengan cakupan kepesertaan 98 persen, ini adalah bukti sisi kehadiran pemerintah bagi masyarakatnya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan. (ant)

Pemkab Jembrana Siapkan Puluhan Calon Perbekel

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali menyiapkan puluhan pegawainya untuk calon perbekel atau kepala desa, karena sebagian besar masa jabatan pimpinan desa tersebut habis pada bulan Mei ini.

“Sebanyak 19 orang perbekel akan habis masa jabatannya pada bulan Mei ini, yang untuk sementara akan digantikan pegawai dari Pemkab, sampai diperoleh perbekel definitif hasil pemilihan pada bulan September mendatang,” kata Ketua Forum Perbekel/Lurah Kabupaten Jembrana I Gede Suardika, saat rapat forum tersebut, di Negara, Selasa.

Ia mengatakan, pemilihan perbekel di Kabupaten Jembrana akan dilakukan serentak pada bulan September, dengan pelantikan akan dilakukan pada bulan Desember.

Selama rentang waktu dari

sekarang hingga bulan Desember, katanya, ada 35 perbekel yang habis masa jabatannya dengan 19 diantaranya pada bulan Mei, dan sisanya bervariasi sampai bulan Desember.

“Selain yang habis masa jabatannya pada bulan Mei, pejabat sementara juga akan mengisi posisi perbekel yang habis jabatannya pada bulan Agustus. Sedangkan yang masa jabatannya habis bulan Oktober, November dan Desember diperbolehkan mengambil cuti,” katanya.

Ia berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai pejabat sementara perbekel, benar-benar memiliki kemampuan sebagai pimpinan desa, sehingga bisa menjalankan program desa dan pemerintah kabupaten.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Putu Artha yang



Bupati Jembrana I Putu Artha saat memberikan sambutan dalam rapat Forum Perbekel/Lurah Jembrana, yang membahas pemilihan perbekel serentak pada bulan September mendatang, Selasa (7/5). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana)

hadir dalam rapat forum ini mengimbau, pelaksanaan pemilihan perbekel secara serentak ini bisa berjalan aman dan lancar.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja perbekel, yang mampu

mengembangkan desa serta menjaga wilayahnya tetap aman selama mereka menjabat.

Selain Artha, Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan juga mengikuti pertemuan ini bersama pejabat terkait lainnya. (ant)

Bidan Jembrana Diperintahkan Pantau Kesehatan Lingkungan



Bupati Jembrana I Putu Artha menyerahkan SK CPNS kepada enam bidan, dengan pesan mereka memperhatikan dan memiliki data kesehatan di lingkungan masing-masing, Senin (13/5). (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

Bidan yang bertugas di Kabupaten Jembrana, Bali, diperintahkan untuk memantau dan memperhatikan kesehatan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat langsung.

Perintah itu disampaikan

Bupati Jembrana I Putu Artha, saat menyerahkan SK CPNS kepada enam bidan, yang pengangkatan mereka melalui program pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, di Negara, Jembrana, Senin.

“Para bidan harus rutin turun ke lapangan memonitor kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Bidan harus tahu apabila ada warga yang sakit, khususnya dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan,” katanya.

Menurut dia, pendataan yang baik dari para bidan, akan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang cepat terhadap warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ia mencontohkan, apabila ditemukan warga yang membutuhkan bantuan kursi roda, bidan bisa segera melaporkan ke dinas terkait agar bantuan bisa segera diberikan.

“Bidan yang bertugas di pos kesehatan desa, juga harus mau memberikan pelayanan langsung ke rumah-rumah apabila ada warga yang membutuhkan, karena yang bersangkutan tidak mampu datang ke pusat pelayanan kesehatan karena menderita

sakit,” katanya.

Selain itu, ia berpesan, agar bidan aktif menularkan ilmu kesehatan kepada masyarakat, lewat pertemuan ibu-ibu di banjar/dusun maupun pengajian.

Dengan memberikan pemahaman tentang kesehatan kepada ibu-ibu, hal ini akan menurunkan jumlah kematian ibu dan anak yang menjadi salah satu program utama Pemkab Jembrana.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Jembrana I Made Budiasa mengatakan, bidan yang mendapatkan SK CPNS ini adalah mereka yang mengikuti seleksi PTT pada tahun 2016 dengan usia maksimal 40 tahun.

Ia mengungkapkan, enam bidan yang diangkat jadi CPNS ini rata-rata sudah mengabdikan sebagai PTT selama 14 tahun dengan bertugas di pos pelayanan kesehatan desa. (ant)

Kemiskinan di Buleleng Menurun Selama Lima Tahun

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Buleleng, Bali, mencatat angka kemiskinan di daerah itu mengalami penurunan selama rentang waktu lima tahun (2014 hingga 2018).

“Tahun 2014, persentase angka kemiskinan di Buleleng tercatat sebesar 6,69 persen atau sekitar 43.700 jiwa, sedangkan sampai dengan akhir tahun 2018 berada pada angka 5,36 persen atau sekitar 35.200 jiwa,” kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini di Singaraja, Buleleng, Jumat.

Dalam rapat koordinasi TKPK Buleleng, ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan secara kumulatif di Kabupaten Buleleng tersebut menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dirancang oleh Pemkab setempat.

Selain itu, dengan menurunnya angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir, hal itu menandakan adanya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup

masyarakat Buleleng.

Dalam menggenjot penurunan angka kemiskinan di Buleleng, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan melalui SKPD terkait, baik program dan kegiatan itu bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, maupun anggaran dari APBD Provinsi maupun dari APBN.

“Sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada desa dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, dan dikemas dalam suatu wadah Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GARDU-PASKIN),” katanya.

Selain itu, sejumlah program dan kegiatan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan ekonomi mikro telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Pemkab Buleleng sendiri telah membuktikan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan di Bumi Denbukit ini, yang salah satunya melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor



Pemkab Buleleng menerima bantuan Mesin Pengolahan Air Bersih melalui Bantuan Hibah Grassroots Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Jepang kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Jumat (3/5/2019). (ANTARA/HO/Konjen Jepang di Denpasar)

2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan,” katanya.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada tahun 2017 – 2022 ini akan dilakukan secara bertahap dengan memfokuskan penuntasan pada setiap tiga kecamatan. Untuk itu, Pemkab Buleleng akan melakukan pemetaan atas desa-desa yang akan disasar pada setiap tiga kecamatan sasaran.

Mesin Bantuan Jepang

Pada hari yang sama, Pemkab Buleleng juga menyelenggarakan serah terima Mesin Pengolahan Air Bersih melalui Bantuan Hibah

Grassroots Tahun Anggaran 2016 dari Pemerintah Jepang kepada Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Acara ini dihadiri oleh Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Hirohisa Chiba, dan Sekretaris II Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, sedangkan dari pihak Indonesia diwakili Bupati Buleleng yang juga diwakili oleh I Made Subur (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/PMD) Kabupaten Buleleng, dan Irving Gino Latief (Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Mandiri Indonesia). (ant)

Bupati : Kodim 1609/Buleleng Sangat Mendukung Program Pembangunan



Bupati Buleleng menyampaikan pujian kepada jajaran TNI saat menyambut Tim Penilai Lomba Pembinaan Teritorial TNI AD Tingkat Pusat di Markas Kodim 1609/Buleleng. Senin (13/5). (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai Kodim 1609/Buleleng selama ini sangat mendukung program pembangunan yang dilakukan Pemkab Buleleng, diantaranya peningkatan ketahanan pangan, bedah rumah, pembangunan embung, pembukaan jalan baru di perdesaan, dan penciptaan keaman-

an dan ketertiban masyarakat.

Keterangan pers yang diterima dari Humas Pemkab Buleleng di Singaraja, Selasa, menyebutkan penilaian atau pujian itu disampaikan Bupati Buleleng saat menyambut Tim Penilai Lomba Pembinaan Teritorial TNI AD Tingkat Pusat di Markas Kodim 1609/Buleleng (13/5).

“Kodim 1609/Buleleng dibawah kepemimpinan Letkol Infanteri Verdy De Irawan selaku Komandan Kodim sangat baik. Di bawah komandonya, komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara Kodim 1609/Buleleng dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah membuahkan hasil yang baik, terutama dalam hal penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Bupati Suradnyana.

Pihaknya sangat mengapresiasi upaya Kodim 1609/Buleleng dalam hal penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya pembinaan teritorial yang telah dilakukan selama ini di Buleleng. Selain itu, Kodim 1609/Buleleng juga telah banyak memberikan dukungan

kepada Pemerintah Daerah, baik dukungan moril, materiil, maupun dukungan personel.

“Tidak saja dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas, tetapi juga dalam hal menuntaskan program pembangunan yang dirancang oleh Pemkab Buleleng, seperti peningkatan ketahanan pangan, bedah rumah, pembangunan embung, dan pembukaan jalan baru di perdesaan,” katanya.

Bupati juga menceritakan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antaranggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Buleleng. “Keberlangsungan pembangunan di Buleleng membutuhkan dukungan dari komponen sipil dan militer,” katanya. (ant)